

**ABSTRAK**

Hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan masih menjadi topik perdebatan masyarakat internasional dari sejak berdirinya organ tersebut. Meskipun maksud dan tujuan pemberian hak tersebut adalah semata-mata untuk membantu pelaksanaan tugas utama Dewan Keamanan dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi seiring berjalannya waktu konsep, pemberlakuan hak veto tersebut berubah menjadi alat atau instrumen politik untuk menekan negara-negara lain demi melindungi kepentingan nasional masing-masing negara anggota tetap Dewan Keamanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemberlakuan hak veto tersebut, yang meliputi: arti penting resolusi Dewan Keamanan dalam pembentukan hukum internasional kontemporer, unsur tekanan yang terdapat pada pemberlakuan hak veto dalam proses pembentukan resolusi Dewan Keamanan, serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menekan pemberlakuan hak tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan konsep pemberlakuan hak veto tersebut dapat mengakibatkan suatu resolusi Dewan Keamanan bersifat lemah dikarenakan hilangnya kesamaan kedudukan negara yang berdaulat sebagai akibat adanya tekanan politik dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan dalam membentuk suatu resolusi Dewan Keamanan yang memiliki karakteristik sebagai perjanjian internasional.

**Kata Kunci:** Perjanjian Internasional, Hak Veto, Tekanan Politik, Resolusi Dewan Keamanan.

**ABSTRACT**

*The right to veto possessed by the five permanent members of the United Security Council Nations has remained the main issue in international community since its establishment. Despite the principal purpose of the right was solely to assist the Security Council to perform its duties in scope of maintenance of international peace and security, as time goes by, the application of the right has changed into a tool of political coercion towards other States for the sake of the permanent members' national interests protection. This research is a legal research which intend to scrutinize problems related to the right's application, that includes: significance of the Security Council's resolutions in the formation of contemporary international law, elements of coercion in the right to veto, and legal means to suppress the application of the right to veto. The result of this research demonstrates that the changing concept of the right's application may weaken a Security Council's resolution because of the absence of the equality of sovereign States as a result of political coercion done by the permanent members in the conclusion of resolution in the conclusion of resolution which has characteristics as an international agreement.*

**Keywords:** *International Agreement, Right to Veto, Political Coercion, Security Council's Resolution.*